



Dinamika Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Desa Wisata Bakas Kabupaten Klungkung

Dewa Ayu Laksmi Ratih Dharmapatni¹, I Nyoman Darma Putra², I Wayan Suardiana³

¹Program Studi Magister Kajian Budaya, Universitas Udayana, Indonesia, laksmyratih@gmail.com

²Program Studi Magister Kajian Budaya, Universitas Udayana, Indonesia

³Program Studi Magister Kajian Budaya, Universitas Udayana, Indonesia

Corresponding Author: laksmyratih@gmail.com¹

Abstract: *This study analyzes the dynamics of power relations in the development and management of Desa Wisata Bakas, Klungkung Regency, Bali. The development of rural tourism in Bakas did not emerge solely from formal government planning but originated from local community initiatives, particularly rafting activities initiated in 2017. Using a qualitative approach and Michel Foucault's perspective on power relations, this study finds that the management of Bakas Tourism Village has shifted from a personal initiative to a more institutionalized collective structure involving the village government, Pokdarwis, tourism entrepreneurs, and the regency government. However, coordination among actors remains dynamic, especially concerning ticket management, regulatory adjustment, and distribution of authority. This study concludes that rural tourism governance is not merely an economic process but a field of negotiation in which power operates productively and relationally.*

Keywords: *Rural Tourism, Power Relations, Governance, Bakas, Foucault*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis dinamika relasi kuasa dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Bakas, Kabupaten Klungkung. Pengembangan desa wisata di Bakas tidak sepenuhnya lahir dari perencanaan formal pemerintah, melainkan berawal dari inisiatif warga lokal melalui aktivitas rafting sejak tahun 2017. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan perspektif relasi kuasa Michel *Foucault*, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Bakas mengalami pergeseran dari inisiatif personal menuju struktur kolektif yang lebih terlembaga melalui peran pemerintah desa dan Pokdarwis. Meskipun demikian, koordinasi antaraktor masih bersifat dinamis, khususnya terkait pengelolaan tiket, penyesuaian regulasi, dan pembagian kewenangan. Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola desa wisata bukan hanya proses ekonomi, melainkan arena negosiasi relasi kuasa yang bersifat produktif dan relasional.

Kata Kunci: *Desa Wisata, Relasi Kuasa, Tata Kelola, Bakas, Foucault*

PENDAHULUAN

Desa wisata dalam lanskap pariwisata kontemporer tidak dapat lagi dipahami semata sebagai entitas spasial atau administratif, melainkan sebagai arena sosial yang diproduksi melalui praktik, wacana, dan relasi kuasa. Ia merupakan ruang yang dikonstruksi agar memiliki nilai ekonomi, simbolik, dan kultural melalui mekanisme representasi, kurasi pengalaman, serta konsumsi lanskap oleh wisatawan. Dalam proses tersebut, pembangunan desa wisata bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga proses produksi makna yang menentukan legitimasi aktor, pembagian otoritas, serta distribusi manfaat. Dengan kata lain, desa wisata adalah arena tempat pembangunan dan kuasa saling berkelindan.

Pendekatan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) sering diposisikan sebagai model normatif yang menjanjikan partisipasi dan pemerataan manfaat. Namun, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa bentuk “berbasis komunitas” tidak pernah homogen dan sering kali dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, kapasitas kelembagaan, serta distribusi modal yang tidak setara (Pramono et al., 2025). Artinya, partisipasi bukanlah kategori yang netral; ia dibentuk oleh relasi sosial yang memungkinkan sebagian aktor lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Dalam konteks ini, desa wisata perlu dibaca sebagai arena relasional yang memperlihatkan bagaimana kuasa bekerja secara produktif dalam membentuk struktur pengelolaan dan praktik keseharian.

Dalam kerangka teoritis, penelitian ini bertumpu pada konsep relasi kuasa Michel *Foucault* yang menolak pemahaman kuasa sebagai kepemilikan tunggal, dan sebaliknya memandangnya sebagai jaringan relasi yang tersebar dan bekerja melalui diskursus, institusi, serta praktik sosial (*Foucault*, 1978; 1980). Kuasa dalam perspektif ini bersifat produktif: ia membentuk subjek, menghasilkan kebenaran, serta menetapkan batas-batas tentang apa yang dianggap sebagai “kemajuan”, “partisipasi”, atau “keberhasilan pembangunan”. Dalam konteks desa wisata, kuasa dapat hadir melalui bahasa kebijakan, regulasi kelembagaan, maupun narasi tentang modernisasi desa. Relasi kuasa tidak selalu tampil dalam bentuk dominasi terbuka, melainkan bekerja secara subtil melalui normalisasi dan internalisasi nilai-nilai pembangunan.

Untuk memperdalam pembacaan atas dinamika tersebut, penelitian ini juga menggunakan kerangka struktural generatif Pierre *Bourdieu*, khususnya konsep habitus, modal, dan arena (field) (*Bourdieu*, 1977; *Bourdieu & Wacquant*, 1992). Arena desa wisata dipahami sebagai ruang sosial tempat aktor berinteraksi dan berkompetisi dengan membawa berbagai bentuk modal: ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Posisi aktor dalam arena tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi oleh akumulasi dan konversi modal yang dimilikinya. Aktor dengan jaringan luas, pengalaman di sektor pariwisata, dan legitimasi kultural memiliki peluang lebih besar untuk menentukan arah kebijakan dan inovasi produk wisata. Dengan demikian, relasi kuasa tidak semata-mata struktural, tetapi juga direproduksi melalui praktik yang berulang dan disposisi habitus yang menginternalisasi struktur tersebut.

Dalam konteks Bali, perkembangan desa wisata berlangsung cepat sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis masyarakat. Namun, sebagian besar desa wisata masih berada pada tahap berkembang, yang menunjukkan bahwa isu kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan distribusi manfaat belum sepenuhnya terkelola secara inklusif. Kabupaten Klungkung, termasuk Desa Bakas, merepresentasikan dinamika tersebut. Desa Bakas mengalami transformasi dari dominasi pengelolaan eksternal menuju pengelolaan berbasis lokal sejak 2017, sebuah perubahan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga struktural dalam arena sosial desa.

Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa transformasi tersebut membuka ruang pembentukan konfigurasi kuasa baru. Aktor dengan modal sosial dan budaya lebih kuat menempati posisi strategis dalam pengambilan keputusan, sementara partisipasi masyarakat berlangsung secara diferensial sesuai dengan distribusi modal yang dimiliki. Kondisi ini

menegaskan bahwa relasi kuasa dalam desa wisata bukan hanya top-down, melainkan dihasilkan melalui interaksi dinamis antara struktur sosial, praktik kelembagaan, dan habitus masyarakat. Implikasinya, relasi kuasa dapat mendorong percepatan inovasi dan daya saing destinasi, tetapi sekaligus berpotensi mereproduksi ketimpangan partisipasi dan akses terhadap sumber daya (Scheyvens, 1999; Timothy, 2007). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana relasi kuasa terbentuk, dinegosiasikan, dan direproduksi dalam pengelolaan Desa Wisata Bakas, serta bagaimana konfigurasi tersebut memengaruhi partisipasi masyarakat dan distribusi manfaat dalam pembangunan desa wisata.

Sejumlah penelitian mengenai desa wisata di Indonesia umumnya menekankan aspek partisipasi masyarakat, dampak ekonomi, serta strategi pengembangan destinasi berbasis komunitas. Studi-studi tersebut banyak berfokus pada tingkat keberhasilan implementasi *community-based tourism* dalam meningkatkan kesejahteraan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Namun, sebagian besar penelitian masih memosisikan komunitas sebagai entitas homogen dan cenderung normatif dalam memaknai partisipasi. Pendekatan tersebut relatif jarang membedah bagaimana relasi kuasa bekerja di dalam komunitas itu sendiri, khususnya bagaimana kepemilikan modal sosial, budaya, dan simbolik memengaruhi posisi aktor dalam struktur pengambilan keputusan. Kajian tentang desa wisata lebih banyak menilai output (peningkatan ekonomi, jumlah kunjungan, inovasi produk), tetapi belum secara mendalam mengkaji proses sosial yang membentuk konfigurasi kuasa di balik pengelolaan tersebut.

Selain itu, penggunaan perspektif relasi kuasa *Foucault* dalam studi desa wisata masih terbatas, terutama dalam membaca bagaimana diskursus pembangunan dan profesionalisasi kelembagaan membentuk normalisasi praktik pengelolaan. Demikian pula, pendekatan struktural generatif *Bourdieu* belum banyak digunakan untuk melihat desa wisata sebagai arena (field) tempat aktor berkompetisi dan mereproduksi struktur sosial melalui konversi berbagai bentuk modal. Dengan demikian, terdapat celah penelitian dalam memahami desa wisata bukan sekadar sebagai model pembangunan berbasis komunitas, tetapi sebagai arena relasional tempat kuasa diproduksi, dinegosiasikan, dan direproduksi. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis relasi kuasa dalam pengelolaan Desa Wisata Bakas melalui pendekatan *Foucault* dan *Bourdieu* secara integratif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif kritis. Penelitian dilaksanakan di Desa Bakas, Kabupaten Klungkung, yang merupakan salah satu desa wisata di daerah tersebut. Populasi penelitian mencakup seluruh aktor yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata, seperti pemerintah desa, pengelola *BUMDes*, kelompok masyarakat, pelaku usaha lokal, dan pihak eksternal, sedangkan sampel penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam aktivitas pariwisata desa. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bertahap melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi dengan melakukan transkripsi serta *coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan kerangka relasi kuasa *Michel Foucault* dan teori struktural generatif *Pierre Bourdieu* untuk memahami dinamika relasi kuasa, distribusi modal, serta praktik kelembagaan dalam pengelolaan Desa Wisata Bakas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arena Pengembangan Desa Wisata Bakas

Pengembangan Desa Wisata Bakas berlangsung dalam suatu arena sosial yang memiliki aturan, batas kewenangan, serta posisi aktor yang tidak selalu seimbang. Arena ini bukan hanya ruang fisik tempat kegiatan wisata dijalankan, tetapi ruang interaksi yang mempertemukan pemerintah desa, desa adat, kelompok sadar wisata, pelaku usaha lokal, dan

pemerintah kabupaten. Di dalam arena tersebut, keputusan tidak hanya ditentukan oleh semangat kolektif, melainkan juga oleh otoritas formal, legitimasi sosial, serta akses terhadap sumber daya dan jaringan. Penetapan Desa Bakas sebagai desa wisata pada tahun 2017 menjadi titik awal terbentuknya arena pariwisata desa. Berdasarkan wawancara dengan Merdana, pengembangan awal dirintis oleh warga asli Bakas, I Wayan Lebi, yang sebelumnya bergerak dalam bidang fotografi wisata, kemudian berkembang ke trekking dan pengamatan burung. Pada tahap ini, arena masih bersifat terbatas dan berpusat pada inisiatif individu. Namun setelah pandemi COVID-19 dan meninggalnya penggagas awal, pengelolaan dilanjutkan oleh generasi berikutnya serta semakin melibatkan masyarakat dan pemerintah desa.

Perubahan kepemimpinan dan perluasan aktor ini menunjukkan bahwa arena pengembangan desa wisata bersifat dinamis. Hal tersebut tidak tetap, tetapi terus dibentuk oleh peristiwa, pergantian figur, dan kebijakan baru. Dalam praktiknya, ruang pengelolaan tidak sepenuhnya berada di tangan satu pihak. Terdapat pembagian ranah antara pemerintah desa dan desa adat, terutama ketika aktivitas wisata bersinggungan dengan wilayah subak dan kawasan yang memiliki nilai tradisional. Pengelolaan tertentu akhirnya diserahkan kepada desa adat, khususnya terkait kawasan subak dan aktivitas yang berkaitan dengan praktik tradisional. Selain itu, desa juga menghadapi tantangan regulasi, terutama terkait mekanisme pungutan dan tiket masuk. Beberapa kebijakan awal tidak memperoleh persetujuan dari bagian hukum kabupaten sehingga harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Situasi ini memperlihatkan bahwa arena pengembangan desa wisata tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam relasi vertikal dengan struktur hukum pemerintah daerah. Otonomi desa tetap berada dalam batas regulasi yang lebih luas. Di sisi lain, arena ini juga diisi oleh pelaku usaha lokal. Usaha seperti Melangit Adventure didukung sepenuhnya oleh masyarakat Bakas dengan investasi pribadi yang berkisar antara 100 hingga 200 juta rupiah per orang. Rumah-rumah warga yang sebelumnya tidak terpakai mulai dimanfaatkan sebagai homestay. Fenomena ini menunjukkan bahwa arena pengembangan desa wisata bukan hanya ruang kebijakan, tetapi juga ruang ekonomi tempat modal dipertarungkan dan dikembangkan.

Dalam perspektif Pierre *Bourdieu*, arena desa wisata dapat dipahami sebagai field, yaitu ruang sosial tempat berbagai bentuk modal berinteraksi. Modal ekonomi tampak dalam kemampuan warga menanamkan investasi. Modal sosial terlihat dalam jaringan relasi dengan pasar wisata dan pemerintah. Modal kultural muncul dalam kemampuan memahami kebutuhan wisatawan, termasuk wisata edukasi dan budaya. Sementara itu, modal simbolik hadir dalam bentuk reputasi sebagai penggagas atau tokoh yang dihormati. Aktor yang memiliki kombinasi modal tersebut cenderung menempati posisi dominan dalam arena. Dominasi dalam arena ini tidak selalu bersifat terbuka. Ia sering berlangsung melalui pengakuan kolektif terhadap pengalaman dan kontribusi tertentu. Konsep kekerasan simbolik dari *Bourdieu* membantu menjelaskan situasi ketika keputusan yang diusulkan oleh aktor dominan diterima tanpa banyak perdebatan karena dianggap demi kemajuan bersama. Penerimaan tersebut bukan karena paksaan langsung, melainkan karena legitimasi yang telah terbangun secara sosial.

Selain distribusi modal, arena pengembangan desa wisata juga dibentuk oleh produksi wacana. Dalam pemikiran Michel *Foucault*, kuasa bekerja melalui pengetahuan dan bahasa yang dianggap benar. Di Bakas, narasi tentang wisata edukasi, pelestarian subak, dan penguatan budaya lokal membentuk cara desa memaknai pengembangan pariwisata. Rencana pembangunan Museum Subak yang mulai direalisasikan sejak awal 2025 dan ditargetkan rampung pada 2026 dengan progres sekitar 50% merupakan contoh konkret bagaimana ruang dan pengetahuan diproduksi secara bersamaan. Museum tersebut dirancang menampilkan sejarah dan sistem subak, alat pertanian tradisional, serta pertunjukan seni seperti barong dan tari. Dengan demikian, arena pengembangan desa wisata tidak hanya memperjualbelikan pemandangan alam, tetapi juga memproduksi pengetahuan tentang identitas lokal. Dalam

kerangka *Foucault*, produksi pengetahuan ini sekaligus menjadi mekanisme pengaturan: desa mendefinisikan apa yang layak ditampilkan, bagaimana budaya direpresentasikan, dan nilai apa yang dianggap penting. Aspek geografis Desa Bakas juga menjadi bagian penting dari arena tersebut. Keberadaan dua sungai utama, Sungai Melangit dan Sungai Bubuh membuka peluang pengembangan wisata alam. Namun penetapan lokasi sebagai atraksi wisata bukan keputusan netral. Ia melibatkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Ketika suatu kawasan ditetapkan sebagai daya tarik utama, maka arus pengunjung, distribusi pendapatan, dan perhatian kebijakan akan terfokus pada wilayah tersebut.

Program Desa Cantik (Desa Sadar Statistik) yang mendorong pengelolaan data statistik desa juga dapat dibaca sebagai bagian dari arena kuasa. Statistik mengenai jumlah kunjungan, potensi lahan, dan segmentasi wisatawan bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen untuk merencanakan pembangunan. Dalam perspektif *Foucault*, data menjadi bagian dari teknik pengelolaan yang mengarahkan kebijakan. Sementara dalam sudut pandang *Bourdieu*, kemampuan memproduksi dan memanfaatkan data tersebut menjadi modal simbolik dan institusional yang memperkuat posisi desa dalam bernegosiasi dengan pihak luar.

Secara keseluruhan, arena pengembangan Desa Wisata Bakas memperlihatkan bahwa yang diperebutkan bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi juga legitimasi pengelolaan, akses terhadap sumber daya, serta definisi kegiatan yang dianggap sah. Stabilitas arena sangat bergantung pada kejelasan aturan, konsistensi prosedur, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kewenangan desa, desa adat, dan regulasi pemerintah kabupaten. Potensi geografis yang dimiliki Bakas memberikan fondasi kuat bagi pengembangan wisata berbasis alam, budaya, dan edukasi. Namun potensi tersebut hanya dapat berkelanjutan apabila dikelola melalui perencanaan berbasis data, memperhatikan daya dukung lingkungan, serta menjaga fungsi sosial dan budaya yang telah ada. Dengan demikian, arena pengembangan desa wisata di Bakas bukan sekadar latar fisik, melainkan ruang strategis tempat relasi kuasa, distribusi modal, dan produksi pengetahuan saling berkelindan dalam menentukan arah pembangunan desa.

Aktor-Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa Wisata Bakas melibatkan berbagai aktor dengan peran dan kepentingan yang berbeda. Meskipun secara administratif desa memiliki struktur pemerintahan formal, praktik pengembangan pariwisata tidak hanya berjalan melalui jalur birokrasi, melainkan melalui interaksi dinamis antara pemerintah desa, Forkom BPD, desa adat, Pokdarwis, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai pelaku budaya dan ekonomi. Dengan demikian, pengembangan desa wisata dapat dipahami sebagai arena sosial yang mempertemukan kepentingan, nilai, dan sumber daya yang beragam.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa dan Forkomdewi memegang peran penting dalam memberikan legitimasi administratif dan arah kebijakan. I Wayan Arsa menyebutkan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Forkom BPD sejak 2012 dan aktif dalam Forkomdewi di Kabupaten Klungkung. Posisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai penghubung antara desa dan struktur kebijakan yang lebih luas di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dukungan dari dinas pariwisata, termasuk pelatihan serta partisipasi dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia, memperlihatkan adanya relasi vertikal antara desa dan pemerintah daerah. Namun, jika dibandingkan dengan dukungan struktural tersebut, dinamika di Bakas menunjukkan kuatnya peran penggerak lokal. Setelah penetapan resmi sebagai desa wisata pada 2017, para penggerak merasa sempat bingung harus mulai dari mana, dan kemudian Arsa dengan beberapa tokoh desa lainnya menginisiasi inventarisasi potensi desa melalui relawan. Pembangunan ikon Bakas Swing dilakukan melalui gotong royong dan dukungan dana

pribadi. Fakta ini menunjukkan bahwa kekuatan pengembangan tidak hanya bersumber dari struktur formal, tetapi juga dari inisiatif berbasis komunitas.

Di sisi lain, I Wayan Malendra yang telah berkecimpung di dunia pariwisata selama sekitar 30 tahun menyatakan bahwa ia telah membawa tamu ke Bakas sejak akhir 1990-an dan secara konsisten mengembangkan konsep micro-tourism pasca pandemi. Ia mampu menerima sekitar 450–500 tamu per tahun. Data ini menunjukkan bahwa aktor individu dengan jaringan pasar yang kuat memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk arus kunjungan dan citra desa. Keterlibatan masyarakat hadir dalam berbagai bentuk, seperti pemilik homestay, pemandu, penari, penabuh, pembuat canang, hingga petani yang dilibatkan dalam aktivitas edukasi sawah. Namun tingkat partisipasi tidak merata. Sebagian memperoleh manfaat ekonomi langsung, sementara sebagian lain hanya terdampak secara tidak langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap modal dan jaringan memengaruhi posisi aktor dalam struktur pengembangan.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu (1986), situasi ini dapat dipahami sebagai sebuah arena (field) di mana aktor menempati posisi berbeda berdasarkan modal yang dimiliki, modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik. Pemerintah desa memiliki modal institusional dan simbolik; penggerak lokal memiliki modal sosial dan pengalaman pasar; sedangkan masyarakat membawa modal budaya yang berakar pada tradisi dan praktik keseharian. Bourdieu (1977; 1990) menegaskan bahwa praktik sosial lahir dari interaksi antara habitus, modal, dan arena. Habitus agraris masyarakat Bakas serta nilai *Tri Hita Karana* memengaruhi cara pariwisata dikelola agar tetap selaras dengan adat dan lingkungan.

Selain Bourdieu, relasi kuasa dalam pengembangan Desa Wisata Bakas juga dapat dibaca melalui pemikiran Michel Foucault. Foucault (1978; 1980) menjelaskan bahwa kuasa tidak hanya terpusat pada institusi formal, melainkan tersebar dalam relasi sosial dan bekerja melalui diskursus, norma, dan praktik keseharian. Dalam konteks Bakas, kuasa tidak semata-mata berada pada pemerintah desa sebagai otoritas administratif, tetapi juga pada aktor yang mampu membentuk wacana tentang apa itu “desa wisata”, bagaimana budaya dipresentasikan, dan siapa yang berhak mengelola sumber daya wisata. Sebagai contoh, konsep “Satu Hari Menjadi Orang Bali” tidak hanya merupakan paket wisata, tetapi juga bentuk produksi pengetahuan tentang identitas lokal. Melalui program tersebut, budaya direpresentasikan dalam format yang terstruktur dan dapat dikonsumsi wisatawan. Dalam kerangka Foucault, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk relasi kuasa-pengetahuan (power/knowledge), di mana produksi makna tentang budaya sekaligus menjadi mekanisme pengaturan perilaku, standar pelayanan, dan batas-batas representasi adat.

Relasi kuasa juga terlihat dalam mekanisme kontribusi punia sebesar 20% untuk subak dan 80% untuk desa adat. Dalam perspektif Bourdieu (1991), pembagian ini mencerminkan legitimasi simbolik yang membuat struktur distribusi diterima sebagai wajar. Sementara dalam perspektif Foucault, kesepakatan tersebut menunjukkan bagaimana norma adat dan regulasi sosial bekerja sebagai bentuk pengaturan yang tidak selalu bersifat koersif, tetapi efektif karena diterima sebagai bagian dari tatanan moral komunitas. Dalam aspek tata kelola, desa menghadapi kendala regulasi terkait pungutan dan pengelolaan tiket masuk, karena beberapa kebijakan belum mendapat persetujuan dari bagian hukum kabupaten. Akibatnya, desa harus menyesuaikan mekanisme pengelolaan sesuai aturan yang berlaku. Situasi ini menunjukkan bahwa kuasa negara tetap hadir melalui perangkat hukum yang mengatur praktik lokal. Dengan kata lain, relasi kuasa bersifat berlapis: ada kuasa administratif dari negara, kuasa adat dari struktur tradisional, dan kuasa sosial dari penggerak lokal serta jaringan pasar.

Pembagian kewenangan dengan desa adat, terutama dalam pengelolaan kawasan subak dan aktivitas tradisional, memperlihatkan model tata kelola ganda yang khas di Bali. Subak bukan sekadar ruang fisik, tetapi institusi sosial-budaya dengan legitimasi komunitas. Oleh karena itu, pelibatan desa adat merupakan bentuk negosiasi kuasa untuk menjaga

keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan budaya. Secara keseluruhan, pengembangan Desa Wisata Bakas memperlihatkan bahwa relasi kuasa bersifat dinamis dan tersebar. Ia tidak hanya hadir dalam struktur formal pemerintahan, tetapi juga dalam diskursus, praktik budaya, dan jaringan sosial. Dengan memadukan perspektif *Bourdieu* dan *Foucault*, dapat dipahami bahwa keberlanjutan desa wisata bergantung pada kemampuan aktor menjaga keseimbangan antara modal, legitimasi, dan produksi makna. Selama koordinasi dan komunikasi antar aktor berjalan baik, struktur ini dapat bertahan secara stabil. Namun karena arena sosial selalu berubah, tata kelola yang adaptif dan reflektif menjadi prasyarat utama agar Desa Wisata Bakas tetap berkembang tanpa kehilangan jati diri lokalnya.

Bentuk Relasi Kuasa Antaraktor

Relasi kuasa dalam pengembangan Desa Wisata Bakas tidak bekerja hanya melalui perintah langsung atau keputusan formal. Kuasa lebih sering hadir dalam bentuk pengaruh yang terbentuk dari posisi kelembagaan, penguasaan informasi, akses terhadap jaringan, serta kemampuan mendefinisikan apa yang dianggap sebagai prioritas pengembangan. Dalam konteks ini, kuasa dapat dipahami sebagai kemampuan mengarahkan agenda, menentukan makna keberhasilan, dan mengatur siapa yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Ketimpangan pengaruh tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka, tetapi sering hadir sebagai praktik yang terlihat wajar dalam koordinasi sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara, berbagai aktor terlibat dalam pengembangan desa wisata, yaitu pemerintah desa dan Forkom BPD, desa adat, pelaku wisata lokal, serta masyarakat umum. Pemerintah desa dan Forkom BPD memiliki otoritas administratif, terutama dalam memberikan legitimasi kebijakan serta menjalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Keterlibatan dalam forum desa wisata tingkat kabupaten memperluas jaringan dan akses desa terhadap program pelatihan maupun promosi. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa juga bergerak secara vertikal, menghubungkan desa dengan struktur pemerintahan yang lebih luas.

Namun, pengembangan Desa Wisata Bakas tidak sepenuhnya digerakkan oleh struktur formal. Inisiatif seperti pembangunan ikon wisata dan pengembangan program berbasis budaya lahir dari penggerak lokal yang memiliki pengalaman panjang dan jaringan luas dalam bidang pariwisata. Mereka memiliki kapasitas memengaruhi arah pengembangan tanpa harus selalu memegang jabatan administratif tertinggi. Dengan demikian, distribusi kuasa di Bakas tampak lebih menyebar dibandingkan model yang sepenuhnya terpusat pada pemerintah desa, meskipun tetap terdapat aktor kunci yang pengaruhnya lebih besar dibanding warga lain.

Masyarakat umum hadir dalam berbagai peran, seperti pemilik homestay, pemandu wisata, penari, penabuh, petani yang dilibatkan dalam edukasi sawah, serta penyedia jasa lainnya. Akan tetapi, dalam proses perumusan strategi dan kerja sama eksternal, posisi mereka cenderung lebih sebagai pelaksana daripada pengambil keputusan utama. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengaruh antar aktor. Partisipasi tidak selalu berarti kesetaraan dalam menentukan arah kebijakan. Dalam perspektif Pierre *Bourdieu* (1986), situasi ini dapat dipahami melalui konsep arena (field) dan distribusi modal. Arena desa wisata merupakan ruang sosial tempat aktor menempati posisi berbeda sesuai dengan modal yang dimiliki, baik modal ekonomi, sosial, kultural, maupun simbolik. Aktor yang memiliki jaringan luas, pengalaman profesional, serta legitimasi sosial cenderung memiliki posisi dominan dalam menentukan prioritas program.

Bourdieu (1991) juga menjelaskan konsep kekerasan simbolik (symbolic violence), yaitu bentuk dominasi yang bekerja secara halus melalui penerimaan nilai dan norma tertentu sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks Bakas, keputusan yang diambil oleh figur kunci sering dibingkai dalam nilai adat, gotong royong, dan keseimbangan. Karena nilai tersebut dihormati bersama, arah kebijakan jarang dipertanyakan secara terbuka. Dominasi tidak

tampak sebagai paksaan, tetapi diterima sebagai bagian dari tatanan sosial yang sah. Inilah yang disebut sebagai kekerasan simbolik: relasi kuasa yang bekerja melalui legitimasi budaya sehingga tidak disadari sebagai bentuk dominasi.

Jika dianalisis menggunakan pemikiran Michel *Foucault* (1978; 1980), relasi kuasa dalam desa wisata tidak terpusat pada satu lembaga atau individu. Kuasa tersebar dalam jaringan relasi dan bekerja melalui produksi pengetahuan serta pembentukan wacana. Wacana tentang “desa berbasis budaya”, “harmoni adat”, atau “pariwisata tanpa eksploitasi” membentuk cara masyarakat memahami arah pengembangan. Wacana tersebut tidak netral, karena ia menentukan batas-batas apa yang dianggap benar, layak, dan pantas dilakukan. Menurut *Foucault*, kuasa bersifat produktif, bukan hanya represif. Artinya, kuasa tidak hanya membatasi, tetapi juga menghasilkan praktik baru. Di Bakas, relasi kuasa melahirkan bentuk-bentuk praktik wisata yang mengintegrasikan ritual, pertanian, dan pengalaman budaya ke dalam paket wisata. Praktik ini sekaligus membentuk identitas desa sebagai destinasi berbasis budaya. Dalam kerangka ini, produksi pengetahuan tentang “desa wisata” menjadi bagian dari mekanisme kuasa yang mengatur tindakan dan ekspektasi.

Relasi kuasa juga terlihat dalam pembagian kewenangan antara pemerintah desa dan desa adat, terutama ketika pengelolaan wisata bersinggungan dengan kawasan subak dan aktivitas tradisional. Model tata kelola ganda ini menunjukkan adanya negosiasi antara legitimasi administratif dan legitimasi adat. Kuasa negara hadir melalui regulasi dan prosedur hukum, sementara kuasa adat hadir melalui norma dan otoritas budaya. Kedua bentuk kuasa tersebut saling berinteraksi dan membentuk struktur pengelolaan yang khas. Dalam praktik layanan, relasi kuasa juga berkaitan dengan disiplin kolektif. Kualitas pengalaman wisata sangat bergantung pada kebiasaan yang dijaga secara konsisten, seperti kebersihan lingkungan, keteraturan penerimaan tamu, keamanan, serta standar pelayanan homestay. Disiplin ini tidak selalu dipaksakan secara formal, tetapi bekerja melalui kontrol sosial dan kesadaran bersama. Dalam perspektif *Foucault*, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk normalisasi, yaitu proses pembentukan standar perilaku yang diinternalisasi oleh masyarakat.

Dengan demikian, relasi kuasa dalam pengembangan Desa Wisata Bakas bersifat dinamis dan berlapis. Pemerintah desa memiliki otoritas formal; penggerak lokal memiliki pengaruh berbasis jaringan dan pengalaman; desa adat memiliki legitimasi simbolik; dan masyarakat umum berperan sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat. Kuasa tidak sepenuhnya terpusat, tetapi juga tidak sepenuhnya setara. Secara keseluruhan, konsep “berbasis komunitas” dalam pengembangan desa wisata tetap berada dalam kerangka relasi kuasa yang kompleks. Kuasa bekerja melalui distribusi modal, legitimasi adat, produksi wacana, dan mekanisme simbolik yang membentuk penerimaan sosial. Tantangan ke depan adalah memastikan agar relasi kuasa tersebut tetap terbuka, reflektif, dan memberikan ruang partisipasi yang lebih substantif bagi seluruh warga, sehingga pengembangan desa wisata tidak hanya berjalan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara budaya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Bakas secara formal dilaksanakan melalui musyawarah desa, rapat pengelola desa wisata, serta koordinasi antara Pemerintah Desa Bakas, Forkom BPD, desa adat, dan pelaku usaha wisata. Dalam dokumen dan praktik administratif, musyawarah diposisikan sebagai ruang partisipatif yang terbuka bagi warga untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta menyepakati arah kebijakan bersama. Secara normatif, mekanisme ini mencerminkan prinsip tata kelola partisipatif yang menjadi dasar pengembangan desa wisata berbasis komunitas. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan dinamika lapangan, mekanisme tersebut tidak hanya berlangsung dalam kerangka prosedural. Terdapat tahapan-tahapan informal yang

memengaruhi arah keputusan sebelum dibawa ke forum resmi. Sejak Desa Bakas ditetapkan sebagai desa wisata pada 3 Januari 2017, proses pengambilan keputusan berkembang melalui kombinasi antara inisiatif individu, koordinasi kelompok inti, serta legitimasi melalui forum musyawarah.

Pada tahap awal penetapan desa wisata, para penggerak mengakui bahwa mereka sempat mengalami kebingungan mengenai langkah strategis yang harus dilakukan. Salah satu narasumber menyampaikan bahwa setelah SK turun, mereka “sempat bingung harus mulai dari mana”. Situasi tersebut menunjukkan bahwa arah pengembangan tidak serta-merta dirumuskan melalui forum besar, melainkan melalui diskusi dan inisiatif kelompok kecil yang memiliki komitmen lebih awal terhadap pengembangan desa wisata. Kelompok ini kemudian mengumpulkan relawan dan melakukan inventarisasi potensi desa sebagai dasar penyusunan program. Pola serupa terlihat dalam pembangunan Bakas Swing pada masa pandemi. Keputusan untuk memanfaatkan titik lokasi tertentu sebagai ikon desa dilakukan atas inisiatif aktor inti, dengan dukungan gotong royong warga serta penggunaan dana pribadi. Proses tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perumusan ide strategis sering kali lahir dari lingkaran terbatas sebelum dibahas dalam forum yang lebih luas. Forum musyawarah kemudian berfungsi sebagai ruang untuk menyampaikan rencana, memperoleh persetujuan, serta memperkuat legitimasi sosial.

Dengan demikian, mekanisme pengambilan keputusan di Bakas dapat dipahami sebagai proses bertahap: gagasan dirumuskan secara informal oleh aktor yang memiliki visi dan pengalaman, kemudian dibawa ke forum resmi untuk dibahas dan disahkan. Musyawarah desa tetap berperan penting, terutama ketika menyangkut pembagian manfaat ekonomi, kontribusi punia kepada subak dan desa adat, serta kerja sama dengan pihak luar. Diskusi berlangsung, dan dalam beberapa kasus terjadi negosiasi. Akan tetapi, tidak semua peserta memiliki kapasitas pengaruh yang sama dalam menentukan arah akhir keputusan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aktor yang memiliki pengalaman panjang di bidang pariwisata dan jaringan luas dengan pasar maupun pemerintah daerah memiliki posisi tawar lebih kuat. Pengalaman membawa tamu sejak akhir 1990-an, keterlibatan dalam forum desa wisata tingkat kabupaten, serta kemampuan mengakses jaringan promosi memberikan legitimasi tambahan dalam forum. Modal tersebut memperkuat daya pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, masyarakat umum lebih banyak terlibat pada tahap implementasi, seperti pengelolaan homestay, penyediaan konsumsi, pertunjukan seni, maupun kegiatan edukasi pertanian. Mereka hadir dalam forum musyawarah, tetapi peran substantif dalam perumusan kebijakan strategis cenderung terbatas. Partisipasi lebih terlihat sebagai kehadiran dan dukungan terhadap keputusan yang telah disepakati, bukan sebagai posisi dominan dalam merumuskan agenda.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu (1986), musyawarah desa dapat dipahami sebagai arena (*field*) sosial. Arena ini bukan ruang netral, melainkan ruang yang mempertemukan aktor dengan modal berbeda-beda. Modal sosial berupa jaringan relasi, modal kultural berupa pengalaman profesional dan pengetahuan pariwisata, modal ekonomi berupa kemampuan pendanaan, serta modal simbolik berupa pengakuan sebagai perintis atau tokoh masyarakat, menjadi faktor yang menentukan posisi aktor dalam forum. Hasil keputusan musyawarah tidak semata-mata ditentukan oleh argumentasi rasional, tetapi juga oleh struktur posisi para pelaku di dalam arena tersebut. Aktor yang memiliki modal lebih besar cenderung memiliki kemampuan lebih kuat untuk mengarahkan diskusi dan membingkai isu. Dengan demikian, mekanisme pengambilan keputusan tidak sepenuhnya mencerminkan kesetaraan pengaruh.

Konsep kekerasan simbolik (*symbolic violence*) dari Bourdieu (1991) membantu menjelaskan mengapa ketimpangan tersebut jarang diperdebatkan secara terbuka. Dalam masyarakat desa yang menjunjung nilai harmoni, rasa hormat terhadap tokoh, dan semangat gotong royong, perbedaan posisi sosial sering diterima sebagai sesuatu yang wajar. Keputusan yang diusulkan oleh figur kunci jarang dipandang sebagai dominasi, melainkan

sebagai bentuk kepemimpinan yang sah. Dominasi berlangsung secara halus karena dilegitimasi oleh nilai budaya yang dihormati bersama.

Selain melalui kerangka *Bourdieu*, mekanisme pengambilan keputusan ini juga dapat dianalisis menggunakan pemikiran Michel *Foucault* (1978; 1980). *Foucault* menekankan bahwa kuasa tidak hanya berada pada jabatan formal, tetapi tersebar dalam jaringan relasi dan bekerja melalui produksi wacana. Dalam konteks musyawarah desa, kuasa tidak hanya terletak pada siapa yang memimpin rapat, tetapi juga pada bagaimana isu dibingkai dan bahasa pembangunan digunakan. Istilah seperti “kepentingan bersama”, “kemajuan desa”, “pelestarian budaya”, dan “pariwisata berbasis komunitas” menjadi kerangka diskursif yang membatasi ruang kritik. Usulan yang dianggap tidak sejalan dengan narasi tersebut cenderung sulit memperoleh dukungan. Dalam kerangka *Foucault*, ini menunjukkan bahwa kuasa bekerja melalui produksi kebenaran (*regime of truth*), yaitu penetapan standar tentang apa yang dianggap realistis, rasional, dan sesuai dengan nilai desa.

Kuasa juga bersifat produktif. Ia tidak hanya membatasi, tetapi juga menghasilkan praktik baru. Program seperti “Satu Hari Menjadi Orang Bali” tidak hanya menjadi keputusan administratif, tetapi membentuk cara masyarakat mempresentasikan identitas desa. Narasi tersebut kemudian memengaruhi standar pelayanan, tata cara menerima tamu, hingga pengaturan aktivitas budaya. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan menghasilkan bentuk normalisasi, yaitu pembentukan standar perilaku yang diinternalisasi oleh warga. Relasi kuasa vertikal juga terlihat dalam interaksi antara desa dan pemerintah kabupaten. Ketika desa menghadapi kendala regulasi terkait pungutan dan pengelolaan tiket masuk, kebijakan harus disesuaikan dengan ketentuan hukum kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan di tingkat desa tetap berada dalam jaringan kuasa negara yang lebih luas. Otonomi desa bersifat relatif dan selalu bernegosiasi dengan kerangka regulasi formal.

Secara keseluruhan, mekanisme pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Bakas memperlihatkan struktur yang berlapis. Secara formal, musyawarah desa menjadi ruang legitimasi dan simbol partisipasi kolektif. Secara substantif, perumusan ide strategis sering kali dimulai dari aktor inti yang memiliki modal sosial, kultural, dan simbolik lebih kuat. Distribusi pengaruh tidak sepenuhnya setara, tetapi berjalan dalam kerangka nilai harmoni dan gotong royong yang membuatnya diterima sebagai kewajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata berbasis komunitas tidak otomatis menghadirkan kesetaraan kuasa. Mekanisme pengambilan keputusan tetap dipengaruhi oleh struktur sosial, jaringan, dan produksi wacana pembangunan. Tantangan ke depan adalah memperkuat kualitas partisipasi agar tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga membuka ruang deliberasi yang lebih inklusif, sehingga seluruh warga memiliki kesempatan yang lebih seimbang dalam menentukan arah dan manfaat pengembangan desa wisata.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam dinamika pengembangan Desa Wisata Bakas. Keterlibatan warga tidak hanya terlihat dalam bentuk kehadiran pada kegiatan desa, tetapi juga dalam perubahan pola ekonomi, sosial, dan cara pandang terhadap potensi lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Perbekel* Desa Bakas, perkembangan desa wisata telah mendorong masyarakat untuk mulai melihat pariwisata sebagai peluang tambahan di luar sektor pertanian. Beberapa rumah yang sebelumnya tidak difungsikan secara produktif kemudian diubah menjadi homestay. Lahan pertanian yang dahulu hanya dipahami sebagai ruang produksi pangan kini diintegrasikan ke dalam paket wisata edukasi, seperti pengalaman bertani dan pengenalan sistem subak. Transformasi ini menunjukkan bahwa partisipasi tumbuh melalui proses adaptasi bertahap terhadap peluang ekonomi baru.

Wawancara dengan Arsa dan Malendra memperlihatkan bahwa keterlibatan warga sering muncul seiring meningkatnya kebutuhan operasional ketika kunjungan wisatawan bertambah. Desa memerlukan pemandu lokal, penyedia konsumsi, pengelola homestay, serta tenaga pendukung untuk kegiatan trekking dan aktivitas sungai. Dalam situasi tersebut, warga yang memiliki aset, relasi, atau pengalaman lebih dahulu mengambil peran. Namun demikian, kesiapan masyarakat tidak seragam. Ada warga yang memiliki kemampuan bahasa asing dan pengalaman kerja di sektor pariwisata, sehingga relatif percaya diri untuk berinteraksi dengan wisatawan. Sebaliknya, ada pula warga yang masih merasa ragu karena belum memahami standar pelayanan atau belum terbiasa berhadapan dengan tamu dari luar daerah maupun luar negeri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkembang secara bertahap dan dipengaruhi oleh kapasitas individu. Sebagian warga berperan aktif sebagai pengelola atau pelaku utama, sementara sebagian lainnya berada pada posisi pendukung. Perbedaan ini bukan semata-mata akibat kurangnya kemauan, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap pelatihan, informasi, dan jaringan kerja. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa pelatihan memang pernah dilakukan, namun belum menjangkau seluruh warga secara merata. Akibatnya, partisipasi lebih kuat pada kelompok tertentu yang telah memiliki modal awal.

Dalam kerangka pemikiran Pierre *Bourdieu*, situasi tersebut dapat dipahami melalui konsep distribusi modal. Warga yang memiliki modal ekonomi, seperti kepemilikan lahan atau bangunan, memiliki peluang lebih besar untuk membuka homestay atau usaha pendukung. Mereka yang memiliki modal sosial, berupa jaringan dengan agen perjalanan atau relasi dengan pemerintah kabupaten, cenderung lebih mudah mengakses kerja sama eksternal. Sementara itu, modal kultural seperti kemampuan bahasa asing, pengetahuan mengenai pelayanan wisata, dan pengalaman kerja di sektor pariwisata turut memperkuat posisi mereka dalam arena desa wisata. Dengan demikian, partisipasi bukan hanya soal kemauan, tetapi juga dipengaruhi oleh posisi sosial yang terbentuk melalui akumulasi modal.

Lebih jauh, *Bourdieu* juga menjelaskan bahwa struktur sosial membentuk habitus, yaitu pola pikir dan kecenderungan bertindak yang tertanam dalam diri individu. Habitus masyarakat Bakas yang berakar pada kehidupan agraris dan nilai gotong royong sebenarnya mendukung kerja kolektif. Namun ketika desa memasuki ranah pariwisata yang menuntut profesionalitas dan standar pelayanan tertentu, tidak semua warga dapat langsung menyesuaikan diri. Sebagian membutuhkan waktu untuk membangun rasa percaya diri dan keterampilan baru. Dalam konteks ini, partisipasi menjadi proses pembelajaran sosial yang terus berkembang. Selain itu, konsep kekerasan simbolik dari *Bourdieu* membantu menjelaskan mengapa ketimpangan partisipasi tidak selalu dipersoalkan secara terbuka. Keputusan yang diambil oleh tokoh atau penggerak utama sering diterima sebagai sesuatu yang wajar karena dibungkus dalam nilai kebersamaan dan kemajuan desa. Dominasi tidak tampil dalam bentuk paksaan, melainkan melalui penerimaan yang halus atas otoritas sosial tertentu. Akibatnya, warga yang berada pada posisi kurang strategis jarang mempertanyakan arah kebijakan secara langsung.

Jika dilihat melalui perspektif Michel *Foucault*, partisipasi masyarakat juga tidak terlepas dari cara kuasa bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kuasa tidak hanya berada pada jabatan formal, tetapi tersebar melalui praktik, wacana, dan norma sosial. Wacana tentang “desa wisata berbasis masyarakat” membentuk gambaran bahwa seluruh warga memiliki ruang yang sama untuk terlibat. Namun dalam praktiknya, siapa yang lebih sering berbicara dalam forum, siapa yang dipercaya mengelola program, dan siapa yang hanya menjalankan keputusan tetap dipengaruhi oleh relasi kuasa yang sudah ada sebelumnya. Kuasa bekerja secara produktif, membentuk identitas baru sebagai “pelaku wisata”, sekaligus menentukan batas-batas tindakan yang dianggap pantas.

Partisipasi masyarakat di Bakas juga dapat dibaca melalui perubahan kebiasaan sehari-hari. Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap kebersihan

lingkungan, keteraturan ruang, serta kesiapan menerima tamu. Rumah tangga yang terlibat sebagai homestay mulai menyesuaikan tata ruang dan standar pelayanan. Keramahan menjadi bagian dari citra kolektif desa. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pengulangan praktik dan interaksi yang terus-menerus dengan wisatawan. Dengan kata lain, partisipasi tidak hanya berbentuk kehadiran dalam rapat, tetapi juga terwujud dalam pembentukan kebiasaan sosial baru. Meskipun demikian, tingkat partisipasi belum sepenuhnya mencapai tahap pemberdayaan penuh. Sebagian besar warga masih lebih dominan sebagai pelaksana operasional dibanding sebagai penentu agenda strategis. Ruang pengambilan keputusan yang substantif masih banyak dipengaruhi oleh aktor inti yang memiliki pengalaman dan jaringan lebih luas. Partisipasi yang terjadi dapat dikategorikan sebagai partisipasi fungsional, di mana masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program dan menerima manfaat ekonomi, tetapi belum sepenuhnya memiliki kontrol terhadap keseluruhan arah pengembangan.

Dinamika ini menunjukkan bahwa partisipasi bersifat bergerak dan berubah sesuai dengan fase perkembangan desa wisata. Pada tahap awal, kebutuhan tenaga dan sumber daya mendorong keterlibatan yang lebih luas. Ketika pengelolaan mulai stabil, struktur peran menjadi lebih jelas dan cenderung terkonsolidasi pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, partisipasi perlu dipahami sebagai proses yang terus dinegosiasikan, bukan sebagai kondisi yang statis. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Bakas menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam aspek ekonomi dan perubahan pola pikir. Namun, distribusi kapasitas dan akses yang belum merata menyebabkan kualitas partisipasi berbeda antarwarga. Penguatan pelatihan, pendampingan berkelanjutan, serta pembukaan ruang dialog yang lebih setara menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas keterlibatan. Dengan demikian, pengembangan desa wisata tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang lebih inklusif dan reflektif terhadap relasi kuasa yang ada.

Implikasi Relasi Kuasa dalam Pengembangan Desa Wisata Bakas

Relasi kuasa dalam pengembangan Desa Wisata Bakas tidak hanya bekerja pada tingkat pengambilan keputusan formal, tetapi membentuk keseluruhan struktur tata kelola, distribusi manfaat ekonomi, konstruksi identitas, hingga arah keberlanjutan desa. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, desa wisata dapat dipahami sebagai *arena (field)*, yaitu ruang sosial tempat berbagai aktor berkompetisi dan bernegosiasi berdasarkan distribusi modal yang tidak setara (Bourdieu, 1986; 1990). Sementara itu, melalui kacamata Michel Foucault, pengembangan desa wisata juga merupakan proses produksi pengetahuan dan normalisasi yang membentuk cara desa memahami dirinya sendiri (Foucault, 1978; 1980). Dengan demikian, implikasi relasi kuasa di Bakas bersifat struktural sekaligus diskursif.

Sejak ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2017, pengelolaan Desa Wisata Bakas mengalami transformasi dari inisiatif berbasis aktor perintis menuju struktur yang lebih terlembagakan. Pada fase awal, pengembangan dirintis oleh aktor lokal yang memiliki jaringan pariwisata dan pengalaman profesional. Modal sosial dan modal kultural yang dimiliki aktor perintis tersebut memungkinkan terbentuknya jejaring dengan agen perjalanan dan pasar wisata. Dalam kerangka Bourdieu (1986), posisi dominan dalam arena sosial sering kali ditentukan oleh kombinasi modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik yang dimiliki aktor.

Dalam konteks Bakas, modal simbolik juga melekat pada figur-figur yang dihormati serta pada lembaga desa adat. Legitimasi adat memberikan otoritas moral dalam menentukan arah pembangunan. Kontribusi punia dari pelaku usaha kepada desa adat dan subak—misalnya pembagian 20% untuk subak dan 80% untuk desa adat—menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan dilekatkan pada struktur simbolik yang lebih luas. Mekanisme ini memperlihatkan bagaimana pariwisata diregulasi secara kultural,

bukan semata-mata administratif. Dalam istilah *Bourdieu* (1977), praktik tersebut merupakan bentuk reproduksi struktur sosial, di mana arena ekonomi tunduk pada legitimasi simbolik adat.

Namun, dominasi dalam arena desa wisata tidak selalu tampil dalam bentuk konflik terbuka. *Bourdieu* (1990) menyebut bentuk dominasi semacam ini sebagai *kekerasan simbolik*, yaitu proses ketika struktur ketimpangan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Di Bakas, keputusan sering diambil melalui musyawarah, tetapi tidak semua aktor memiliki kapasitas pengaruh yang sama. Aktor yang memiliki pengalaman, jaringan, dan reputasi lebih kuat cenderung lebih menentukan arah kebijakan. Kesepahaman kolektif yang tampak harmonis tidak selalu mencerminkan kesetaraan distribusi kuasa.

Relasi kuasa ini berimplikasi langsung terhadap tata kelola desa. Secara formal, pengelolaan melibatkan pemerintah desa, desa adat, Pokdarwis, dan pelaku usaha. Namun secara struktural, posisi pemerintah desa membawa modal institusional berupa kewenangan administratif dan akses terhadap program pemerintah. Di sisi lain, desa adat memegang modal simbolik yang memastikan legitimasi sosial. Ketika kedua lembaga ini bekerja selaras, stabilitas tata kelola relatif terjaga. Akan tetapi, potensi ketegangan tetap ada, terutama ketika kepentingan administratif dan kepentingan adat tidak sepenuhnya beririsan. Selain relasi horizontal antaraktor lokal, terdapat pula relasi vertikal dengan pemerintah kabupaten. Kendala regulasi terkait pungutan dan tiket masuk menunjukkan bahwa otonomi desa berjalan dalam batas struktur hukum yang lebih luas. Dalam perspektif *Foucault* (1980), regulasi tersebut bukan sekadar aturan teknis, tetapi bagian dari mekanisme kuasa yang mengatur dan membatasi praktik lokal. Kuasa bekerja melalui legalitas dan normalisasi prosedur, bukan melalui represi langsung.

Implikasi relasi kuasa juga tampak dalam distribusi manfaat ekonomi. Pengembangan Desa Wisata Bakas membuka peluang investasi lokal, seperti pada unit usaha Melangit Adventure yang dibiayai oleh beberapa warga dengan modal ratusan juta rupiah per orang. Hal ini menunjukkan adanya akumulasi modal ekonomi di tingkat lokal. Namun akses terhadap peluang tersebut tidak merata. Warga yang memiliki modal ekonomi, jaringan sosial, dan keterampilan bahasa lebih mudah menempati posisi strategis dalam rantai nilai pariwisata, seperti pengelola homestay, penghubung agen perjalanan, atau pengelola paket wisata. Dalam kerangka *Bourdieu* (1986), ketimpangan tersebut merupakan konsekuensi dari distribusi modal dalam arena sosial. Mereka yang memiliki modal lebih besar akan mempertahankan atau memperluas posisinya. Ketimpangan ini tidak selalu dipersepsikan sebagai ketidakadilan karena dilegitimasi melalui narasi meritokrasi, bahwa keberhasilan adalah hasil kerja keras individu. Di sinilah konsep kekerasan simbolik relevan: struktur ketimpangan direproduksi melalui penerimaan sosial yang tidak dipersoalkan secara kritis (*Bourdieu*, 1990).

Dari perspektif *Foucault* (1978), distribusi manfaat juga dipengaruhi oleh produksi wacana tentang “kemajuan desa” dan “peluang terbuka bagi semua warga.” Wacana ini menciptakan kesan inklusivitas, meskipun dalam praktiknya akses sangat dipengaruhi oleh jaringan dan kompetensi tertentu. Kuasa bekerja secara produktif dengan membentuk subjek-subjek yang melihat diri mereka sebagai bagian dari proyek pembangunan desa, bahkan ketika posisi mereka dalam struktur ekonomi berbeda-beda. Lebih jauh, relasi kuasa turut membentuk konstruksi identitas desa. Narasi tentang wisata edukasi, pelestarian subak, dan pengalaman “Satu Hari Menjadi Orang Bali” menunjukkan bagaimana budaya lokal dikurasi dan direpresentasikan untuk konsumsi wisatawan. Pembangunan Museum Subak menjadi simbol produksi pengetahuan tentang pertanian tradisional dan identitas agraris desa. Dalam kerangka *Foucault* (1980), produksi pengetahuan tersebut adalah bagian dari praktik kuasa yang menentukan apa yang dianggap autentik, layak dipertontonkan, dan bernilai ekonomi. Kuasa dalam konteks ini bersifat produktif: ia menghasilkan standar baru tentang profesionalisme, pelayanan, dan representasi budaya. Namun normalisasi ini juga berpotensi menyederhanakan kompleksitas budaya lokal menjadi paket wisata yang terstandarisasi.

Identitas desa tidak lagi semata-mata lived culture, tetapi juga curated culture yang disesuaikan dengan logika pasar.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan Desa Wisata Bakas sangat bergantung pada reproduksi modal dan regenerasi kepemimpinan. Ketergantungan pada figur-figur kunci dengan jaringan luas berisiko menciptakan konsentrasi kuasa. Oleh karena itu, upaya pelibatan generasi muda melalui pelatihan bahasa Inggris, seni tari, dan tabuh dapat dipahami sebagai strategi reproduksi habitus baru yang adaptif terhadap arena pariwisata (*Bourdieu*, 1977). Tanpa regenerasi tersebut, arena desa wisata berpotensi mengalami stagnasi atau ketimpangan yang semakin tajam. Dengan demikian, implikasi relasi kuasa dalam pengembangan Desa Wisata Bakas bersifat multidimensional. Relasi kuasa membentuk tata kelola melalui distribusi modal dan legitimasi simbolik; menentukan distribusi manfaat ekonomi melalui akses terhadap jaringan dan kompetensi; membentuk identitas desa melalui produksi wacana; serta memengaruhi keberlanjutan melalui reproduksi struktur sosial. Dalam sintesis perspektif *Bourdieu* dan *Foucault*, desa wisata bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan arena sosial tempat kuasa bekerja secara halus, produktif, dan terus direproduksi. Refleksi kritis terhadap distribusi modal, perluasan partisipasi, serta transparansi pengelolaan menjadi kunci agar pengembangan Desa Wisata Bakas tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kohesi komunitas dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Bakas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses ekonomi berbasis komunitas, melainkan sebagai arena sosial tempat relasi kuasa diproduksi, dinegosiasikan, dan direproduksi secara berkelanjutan. Dengan menggunakan perspektif Pierre *Bourdieu* dan Michel *Foucault*, studi ini menemukan bahwa distribusi modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik menjadi faktor kunci dalam menentukan posisi aktor, arah kebijakan, serta pola distribusi manfaat dalam arena desa wisata.

Relasi kuasa di Bakas bekerja secara halus melalui legitimasi adat, reputasi sosial, jaringan profesional, dan wacana pembangunan desa. Dominasi tidak tampil dalam bentuk konflik terbuka, tetapi hadir melalui mekanisme simbolik yang diterima sebagai kewajaran kolektif. Dalam konteks ini, tata kelola desa memperlihatkan stabilitas yang relatif kuat karena adanya integrasi antara struktur administratif dan legitimasi adat. Namun stabilitas tersebut sekaligus menyimpan potensi ketimpangan, terutama dalam akses terhadap peluang ekonomi dan posisi strategis dalam rantai nilai pariwisata.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa produksi wacana tentang “desa wisata edukatif dan berbasis budaya” tidak hanya membangun identitas kolektif, tetapi sekaligus membingkai batas-batas representasi budaya yang dianggap sah dan bernilai ekonomi. Dengan demikian, kuasa bekerja secara produktif menciptakan norma profesionalisme, standar pelayanan, dan citra autentisitas sekaligus berpotensi menyederhanakan kompleksitas praktik budaya lokal.

Dalam perspektif keberlanjutan, keberhasilan Desa Wisata Bakas bergantung pada kemampuan arena sosial tersebut untuk mereproduksi modal secara lebih inklusif, memperluas partisipasi warga, serta mendorong regenerasi kepemimpinan. Tanpa mekanisme pemerataan akses terhadap modal dan penguatan kapasitas masyarakat, ketimpangan yang terselubung berisiko mengganggu kohesi sosial dalam jangka panjang.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan relevansi sintesis antara pendekatan struktural konstruktif *Bourdieu* dan analisis diskursif *Foucault* dalam membaca dinamika desa wisata. Secara praktis, hasil studi ini merekomendasikan perlunya transparansi tata kelola, penguatan kapasitas warga, serta kebijakan distribusi manfaat yang lebih adil sebagai prasyarat bagi pembangunan desa wisata yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice* (R. Nice, Trans.). Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power* (J. B. Thompson, Ed.; G. Raymond & M. Adamson, Trans.). Polity Press.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). *An invitation to reflexive sociology*. University of Chicago Press.
- Foucault, M. (1978). *The history of sexuality: Volume 1: An introduction* (R. Hurley, Trans.). Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). *Community-based tourism: A success?* (ICRT Occasional Paper No. 11). International Centre for Responsible Tourism.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. Routledge.
- Pramono, J., Kasuma, I. G., Parwita, A. A. G. O., Suyadnya, I. W., & Kurniawan, R. (2025). Empowerment and resilience in rural Indonesia: A pathway to tourism sustainability. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2464785. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2464785>
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249.
- Timothy, D. J. (2007). *Tourism and community development: Issues and approaches*. Routledge.
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633.